

TEORI DAN PRINSIP
Pendidikan Kewarganegaraan

Handouts 2

KOMPONEN KOMPETENSI
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

Samsuri

Email: samsuri@uny.ac.id

MURRAY PRINT (1999; 2000)

- **“civic education”** yang mencakup kajian tentang pemerintahan, konstitusi, rule of law, serta hak dan tanggung jawab warga negara.
- **“citizenship education”** : cakupan dan penekanan kajian meliputi proses-proses demokrasi, partisipasi aktif warga negara, dan keterlibatan warga dalam suatu civil society (masyarakat warga).
- **Kajian PKN** meliputi: hak-hak dan tanggung jawab warga negara; pemerintah dan lembaga-lembaga negara; sejarah dan konstitusi; identitas nasional; sistem hukum dan rule of law; hak-hak asasi manusia, politik, ekonomi dan sosial; prinsip dan proses demokratik; partisipasi aktif warga negara dalam masalah kewargaan; perspektif internasional; dan nilai-nilai kewarganegaraan demokratis.

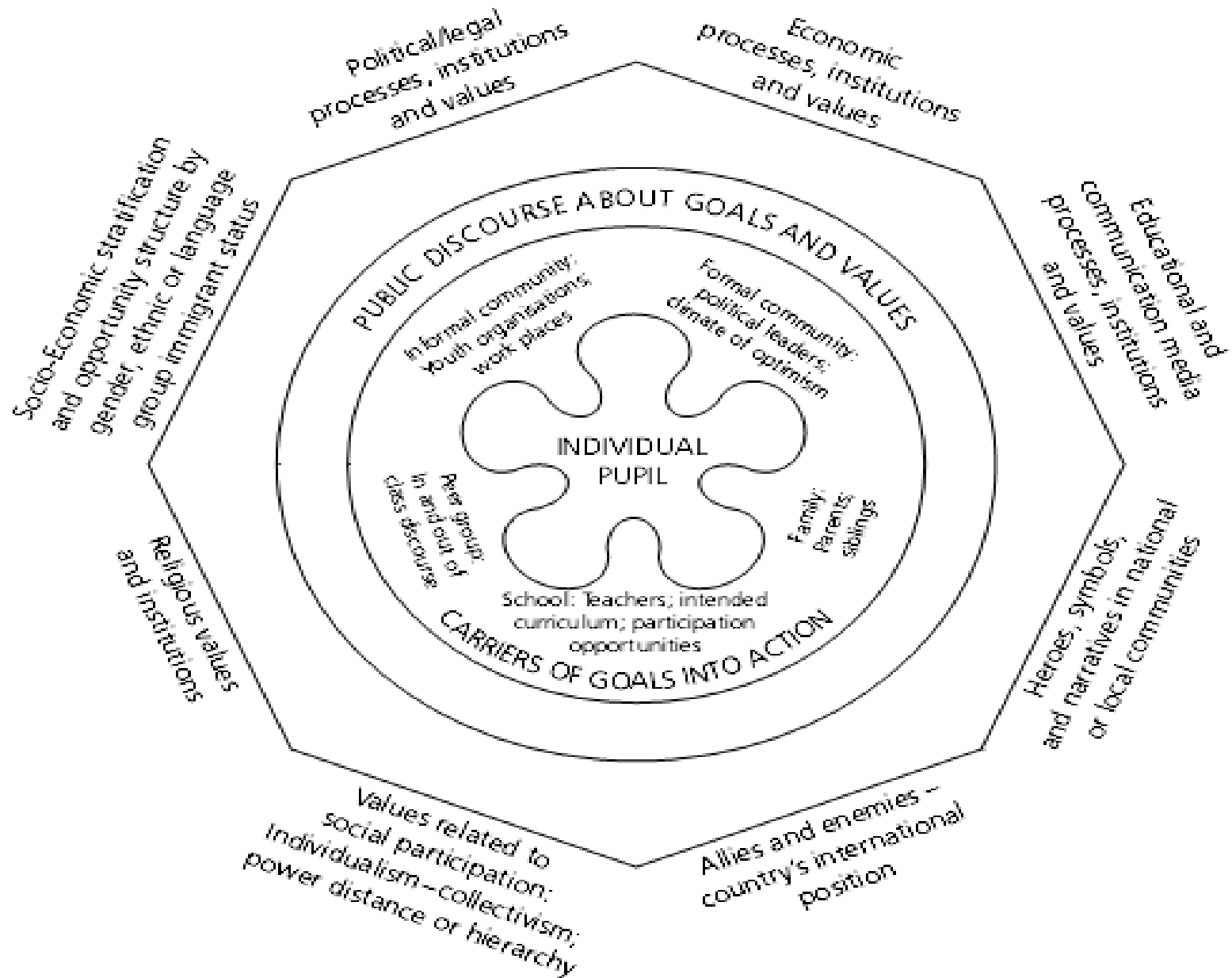
John Patrick (1999)

- (1) *knowledge of citizenship and government in democracy (civic knowledge);*
- (2) *cognitive skills of democratic citizenship (cognitive civic skills);*
- (3) *participatory skills of democratic citizenship (participatory civic skills); dan*
- (4) *virtues and dispositions of democratic citizenship (civic dispositions).*

John Patrick (1999)

PENGETAHUAN KEWARGANEGARAAN DAN PEMERINTAHAN

- (1) *demokrasi perwakilan (representative democracy)*;
- (2) konstitusionalisme;
- (3) hak asasi (liberalisme);
- (4) kewarganegaraan (*citizenship*);
- (5) masyarakat kewargaan (*civil society*);
- (6) ekonomi pasar (*free and open economic system*);
dan,
- (7) tipe-tipe isu publik.



(IEA, 1999)

Nu'man Somantri (2001)

Pendidikan kewarganegaraan sebagai hasil: seleksi dan adaptasi dari lintas disiplin ilmu-ilmu sosial, ilmu kewarganegaraan, humaniora, dan kegiatan-kegiatan dasar manusia yang diorganisasikan dan disajikan secara psikologis dan ilmiah untuk ikut mencapai salah satu tujuan Pendidikan IPS.

Mengikuti Barr, Barth dan Shermis (1977: 59-67) PKn sbg salah satu dari tiga tradisi pengajaran *social studies* yaitu: (1) *social studies taught as citizenship transmission*; (2) *social studies taught as social science*; dan, (3) *social studies taught as reflective inquiry*.

PERKEMBANGAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DI INDONESIA

- 1958-1965
- KEWARGAAN, CIVICS
- MATERI: TUJUH BAHAN POKOK INDOKTRINASI
 1. Pidato Bung Karno 1 Juni 1945 “Lahirnya Pancasila”
 2. UUD 1945 beserta penjelasannya
 3. Manifesto Politik beserta Perinciannya dari DPA
 4. Pidato Presiden 17 Agustus 1960 yang terkenal dengan nama “Djarek,” beserta perinciannya dari DPA
 5. Pidato Presiden di depan Sidang Umum PBB tanggal 30 September 1960 beserta perinciannya dari DPA
 6. Penjelasan Manipol dan USDEK rangkaian pidato radio Ketua Panitia Pembina Jiwa Revolusi Roeslan Abdulgani
 7. Amanat Pembangunan Presiden pada Sidang Depernas 28 Agustus 1959 beserta buku Ringkasan Pembangunan Semesta

Tujuan pendidikan

- ...melahirkan warga-negara-warga-negara Indonesia jang berdjiwa Pantjasila jalah:
 - (a) ke-Tuhanan Jang Maha Esa
 - (b) Perikemanusiaan jang adil dan beradab
 - (c) Kebangsaan
 - (d) Kerakjatan
 - (e) Keadilan Sosial
- jang berdjiwa patriot komplit, supaja melahirkan tenaga-tenaga kedjuruan jang ahli dan berdjiwa Revolusi Agustus 1945, suatu politik dan sistim pendidikan jang menitik-beratkan pada pendidikan kedjuruan.

Empat Aliran PKn Aspek-aspek	Pendidikan Kewarganegaran Liberal	Pendidikan Kewarganegaran Majemuk (Diversity)	Pendidikan Kewarganegaran Kritis	Pendidikan Kewarganegaran Republikan
Hakekat Manusia	Individual	Berafiliasi kepada suatu kelompok sosial	Individu yang di- <i>juxtaposed</i> dengan individu-individu dan kelompok-kelompok lainnya	Berafiliasi kepada bangsa/negara
Hakekat Masyarakat	Suatu kumpulan individu-individu	Suatu kumpulan kelompok sosial	Suatu realitas di mana struktur kekuasaan memelihara memelihara penindasan (oppression)	Bangsa secara keseluruhan adalah lebih <i>worth</i> daripada jumlah bagian-bagiannya
Persepsi Pengetahuan	Menekankan pengetahuan yang bertujuan membantu tindakan individu di ruang publik	Menekankan pengetahuan yang bertujuan kelompok-kelompok sosial bertindak dalam ruang publik	Suatu alat di tangan para penindas yang dapat digunakan dalam ketertiban (order) untuk pertanyaan realitas.	Menekankan pengetahuan yang mengacu kepada entitas sosial yang lebih besar
Persepsi Sikap	Menekankan nilai-nilai individualistik	Menekankan nilai-nilai yang menghubungkan individu dengan kelompok sosial	Dapat dimanipulasi dalam perintah (order) untuk memelihara realitas sosial	Menekankan nilai-nilai yang menghubungkan individu-individu dengan entitas sosial yang lebih luas/besar
Peran Pendidikan	Mengembangkan keterampilan-keterampilan individual	Mengembangkan keterampilan-keterampilan <i>in order to enhance</i> realitas kelompok sosial dan tempatnya dalam masyarakat	Mengembangkan kemampuan-kemampuan kritis	Mendukung perasaan memiliki kepada entitas sosial yang lebih luas/besar
Tujuan Normatif Pendidikan Kewarganegaraan	Siswa akan mengembangkan keterampilan esensial (penting) untuk tindakan sebagai partisipasi seorang warga negara	Siswa akan memahami langkah-langkah di mana perbedaan kelompok sosial yang menyusun masyarakat dapat menerima pengakuan dan mengambil bagian dalam lapangan nasional.	Siswa akan mengembangkan keterampilan analitik individualnya yang diperlukan dalam ketertiban (order) untuk memahami lebih baik realitas ketidakadilan dari masyarakat	Siswa harus memiliki suatu perasaan memiliki yang otentik terhadap negara.

PKN dan Pendidikan Karakter

Fokus Perbandingan	Pendidikan Karakter	Pendidikan Kewarganegaraan
Pokok perhatian Materi yang diajarkan	Memperbaiki orang Karakter dan nilai-nilai	Memperbaiki pemerintahan Pengetahuan tentang pemerintah, hukum, dan politik
Nilai-nilai utama	Tanggungjawab, hormat terhadap diri pribadi dan orang lain, kejujuran, kepedulian, keadilan, kerjasama	kebebasan; kesetaraan; hak-hak legal; keadilan; partisipasi warganegara; patriotisme; menghormati kebhinekaan, kewenangan, kepemilikan dan privasi.
Hal mengkhawatirkan	Rakyat yang buruk; lunturnya standar moral tradisional	Pemerintahan yang buruk; hilangnya kebebasan dan hak asasi
Perhatian Pengajaran	Penanaman/internalisasi untuk pembentukan nilai-nilai pro-sosial	Menanamkan pengetahuan dan keterampilan kewarganegaraan
Fokus Pengajaran	Individu-individu; perilaku personal	Masyarakat; masalah-masalah sosial
Kawasan implementasi dan pembelaan	Sangat sering diterapkan di sekolah dasar; pendukungnya ialah sekelompok pendidik yang beragam yang mencakup kebutuhan pendidikan karakter	Sangat sering diterapkan di sekolah menengah pertama dan atas; pendukungnya adalah para pendidik <i>social studies</i> yang menerima tanggung jawab pendidikan kewarganegaraan.
Metode pengajaran yang dominan	Pengajaran mingguan tentang watak; slogan-slogan; cerita riwayat hidup (biografi) tokoh yang memuat hikmah; program-program penghargaan	Pengajaran langsung tentang pemerintahan, hukum, dan politik; diskusi berbasis masalah/ isu publik; simulasi/peradilan semu dan kunjungan studi lapangan.

KOMPONEN KOMPETENSI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

CIVIC KNOWLEDGE

CIVIC SKILLS

- COGNITIVE SKILLS
- PARTICIPATORY SKILLS

CIVIC DISPOSITIONS

PENGERTIAN DASAR KOMPETENSI KEWARGANEGARAAN

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN YANG EFEKTIF MEMUAT KOMPONEN KOMPETENSI SEBAGAI BERIKUT:

- (1) PENGETAHUAN KEWARGANEGARAAN DAN PEMERINTAHAN DALAM SISTEM DEMOKRASI
- (2) KETERAMPILAN KOGNITIF KEWARGANEGARAAN DEMOKRATIS
- (3) KETERAMPILAN PARTISIPATORI KEWARGANEGARAAN DEMOKRATIS
- (4) KEBAJIKAN/KEUTAMAAN KARAKTER KEWARGANEGARAAN DEMOKRATIS

(Patrick, 1999: 33)

KOMPONEN *CIVIC KNOWLEDGE*

PENGETAHUAN KEWARGANEGARAAN DAN PEMERINTAHAN DALAM SISTEM DEMOKRASI

- a. Konsep ttg substansi demokrasi
- b. Kelangsungan ketegangan yang memunculkan masalah-masalah publik
- c. Konstitusi dan lembaga-lembaga pemerintahan demokratis
- d. Fungsi-fungsi lembaga demokratis
- e. Praktik-praktik kewarganegaraan demokratis dan peranan warga negara
- f. Konteks demokrasi: budaya, sosial, politik dan ekonomi
- g. Sejarah demokrasi di negara tertentu dan dunia

(Patrick, 1999: 34)

KOMPONEN *CIVIC SKILLS*

KETERAMPILAN KOGNITIF KEWARGANEGARAAN DEMOKRATIS

- a. Mengeidentifikasi dan menjelaskan fenomena atau peristiwa-peristiwa kehidupan politik dan warga
- b. Menganalisa dan memaparkan fenomena atau peristiwa-peristiwa kehidupan politik dan warga
- c. Menilai, mengambil posisi, dan membela posisi atas kejadian dan masalah publik
- d. Pembuatan keputusan tentang masalah publik
- e. Berpikir secara kritis tentang kondisi politik dan kehidupan warga
- f. Berpikir secara konstruktif tentang bagaimana memperbaiki kehidupan politik dan warga

(Patrick, 1999: 34)

KOMPONEN *CIVIC SKILLS* (2)

KETERAMPILAN PARTISIPATORI KEWARGANEGARAAN DEMOKRATIS

- a. Berinteraksi dengan warga negara lainnya untuk mendukung kepentingan perseorangan dan bersama
- b. Memonitor peristiwa dan masalah-masalah publik
- c. Mempengaruhi pembuatan keputusan-keputusan kebijakan tentang masalah-masalah publik
- d. mengimplementasikan keputusan-keputusan kebijakan tentang masalah-masalah publik

(Patrick, 1999: 34)

KOMPONEN *CIVIC DISPOSITIONS*

KEBAJIKAN/KEUTAMAAN KARAKTER KEWARGANEGARAAN DEMOKRATIS

- a. Mempromosikan kesejahteraan umum/kebaikan bersama masyarakat
- b. Mengakui kesetaraan moral dan martabat setiap orang
- c. Menghormati dan melindungi hak-hak yang dimiliki tiap orang secara setara
- d. Berpartisipasi secara bertanggungjawab dan efektif dalam kehidupan politik dan kewargaan
- e. Mengambil tanggungjawab pemerintahan
- f. Mengurus diri sendiri dengan menjalankan keutamaan kewargaan
- g. Mendukung dan memelihara prinsip dan praktik demokrasi

(Patrick, 1999: 34)

KARAKTER PUBLIK WARGA NEGARA

1. Mendukung kebaikan bersama atau kesejahteraan umum dari masyarakat;
2. Mengakui kesetaraan nilai moral dan martabat kemanusiaan setiap orang;
3. Menghormati dan melindungi hak-hak yang dimiliki oleh setiap orang secara sama;
4. Berperan serta secara bertanggung jawab dan efektif dalam kehidupan politik dan kewargaan;
5. Mengambil tanggung jawab terhadap urusan-urusan pemerintahan dengan persetujuan orang-orang yang diperintah;
6. Menjadi seseorang yang mampu mengatur diri sendiri dengan menerapkan keutamaan kewargaan (*civic virtues*).
7. Mendukung dan memelihara prinsip-prinsip dan praktek demokratis (Hoge,2002).

Karakter Publik & Privat Warga Negara

1. menjadi anggota masyarakat yang independen,
2. memenuhi tanggung jawab personal kewarganegaraan di bidang ekonomi dan politik,
3. menghormati harkat dan martabat kemanusiaan tiap individu,
4. berpartisipasi dalam urusan-urusan kewarganegaraan secara efektif dan bijaksana, serta,
5. mengembangkan berfungsinya demokrasi konstitusional secara sehat. (Branson, 1999)

Tiga macam karakter warga negara

- *sponge citizens* → memiliki karakter seperti massa mengambang, mudah dihasut/mudah terbawa arus/tidak punya pendirian teguh
- *stone citizens* → berkarakter tidak mau melakukan perubahan, cenderung tidak konstruktif untuk kehidupan demokrasi
- *generator citizens* → sejalan dengan karakter warga negara demokratis, artinya mampu menggerakkan dan berpartisipasi aktif sebagai warga negara dalam sistem politiknya. (Nadine dan Clark, 1989 dalam Somantri, 2001: 184-185)

Model Pedagogis PKN

- *PENDEKATAN TRADISIONAL* → MENGHASILKAN WARGA NEGARA YANG HANYA BERTANGGUNG JAWAB SECARA MINIMALIS
- *PENDEKATAN AKTIF-PARTISIPATORI* → PELIBATAN WARGA NEGARA DALAM RANAH PUBLIK
- *PENDEKATAN NILAI* → PEMBENTUKAN WARGA NEGARA BEORIENTASI KEADILAN

(Westheimer & Kahne, 2004; Print, 2010)

Tiga Tipe Warga Negara

Personally responsible citizen

Description

Acts responsibly in his/her community
 Works and pays taxes
 Obeys laws
 Recycles, gives blood
 Volunteers to lend a hand in times of crisis

Sample action

Contributes food to a food drive

Core assumptions

To solve social problems and improve society, citizens must have good character; they must be honest, responsible, and law-abiding members of the community.

Participatory citizen

Active member of community organizations and/or improvement efforts
 Organizes community efforts to care for those in need, promote economic development, or clean up environment
 Knows how government agencies work
 Knows strategies for accomplishing collective tasks

Helps to organize a food drive

To solve social problems and improve society, citizens must actively participate and take leadership positions within established systems and community structures.

Justice-oriented citizen

Critically assesses social, political, and economic structures to see beyond surface causes
 Seeks out and addresses areas of injustice
 Knows about democratic social movements and how to effect systemic change

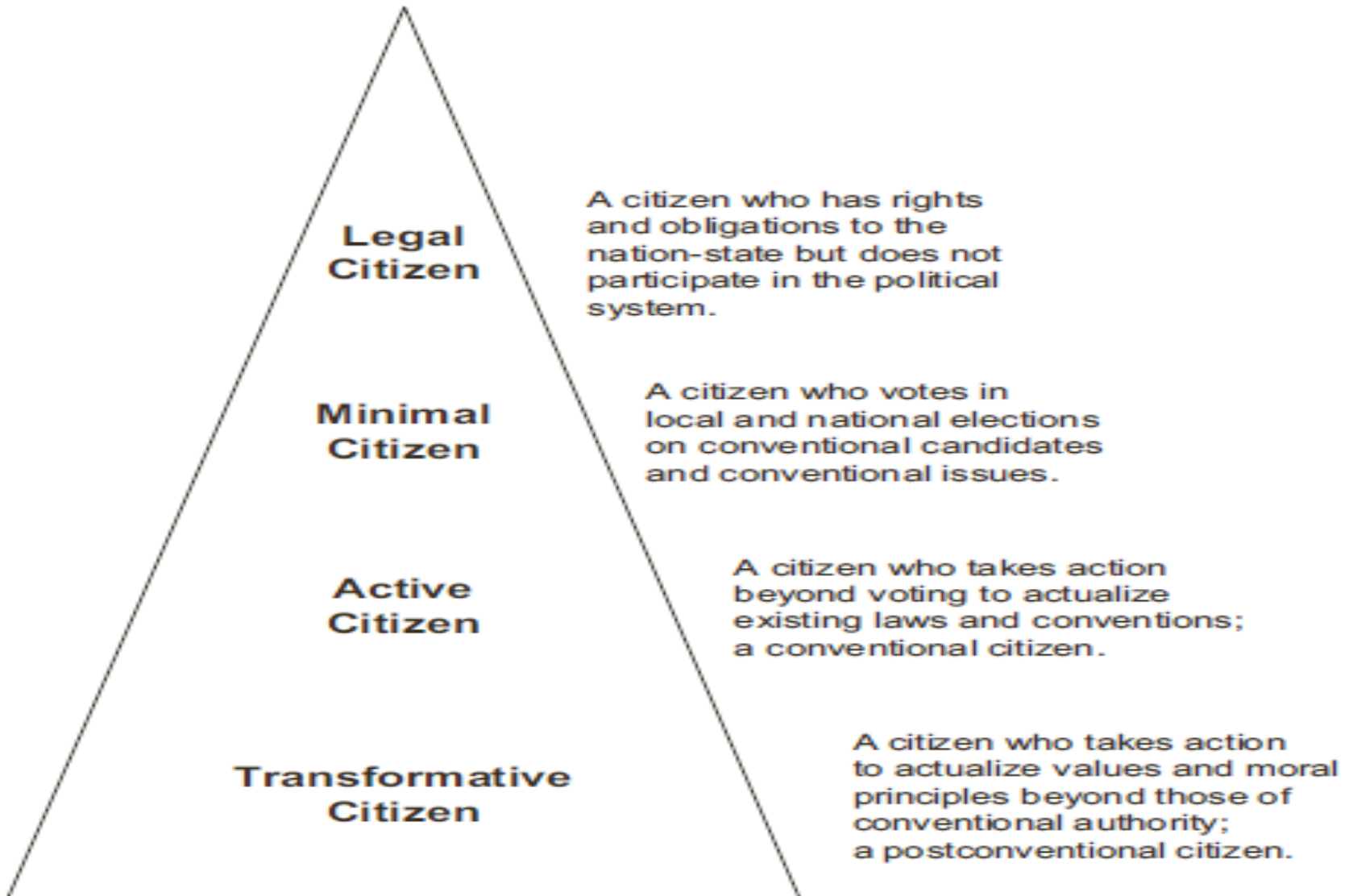
Explores why people are hungry and acts to solve root causes

To solve social problems and improve society, citizens must question, debate, and change established systems and structures that reproduce patterns of injustice over time.

(Westheimer and Kahne, 2004: 240)

Type-tipe Warga Negara

(Banks, 2008: 137)



Tipologi Pedagogi Pendidikan Kewarganegaraan

(Print & Smith, 2000:104)

Passive-cognitive learning

Expository

Document analysis

Case studies

Curriculum materials

Interactive teaching

Critical thinking

School assemblies

Visiting speakers

Multicultural days

Class

School

Values clarification

Debates

Fieldwork

Group problem solving

School activities

Class-parliaments

School elections

Role play

Simulations

Whole-school projects

Cooperative learning

School as role model

Active-participatory learning

Model Pedagogis PKN di Indonesia

- Kritik terhadap model pembelajaran PMP/PPKn era Orde Baru
- Materi pembelajaran verbalistik atas nilai-nilai, cenderung hafalan/kognitif
- Timbul kejenuhan
- Model *talk and chalk*
- Rentan manipulasi kepentingan rejim politik yang sedang berkuasa → monopoli tafsir Pancasila

PENDEKATAN PKN INDONESIA

Masa lalu Pembelajaran PMP/PPKn:

- materi-materi yang diajarkan cenderung verbalistik atas nilai-nilai moral Pancasila
- model pembelajarannya cenderung berbentuk hafalan/kognitif
- materi pelajaran begitu padat atau luas dan kurang praktis dengan alokasi waktu yang terbatas
- para guru umumnya menggunakan metode ceramah dan tanya jawab dengan pemberian tugas. Penggunaan alat peraga sangat minim dan terbatas pada pembelajaran model *talk* dan *chalk* (hanya ceramah dan menulis di papan tulis)

PENDEKATAN PKN INDONESIA (2)

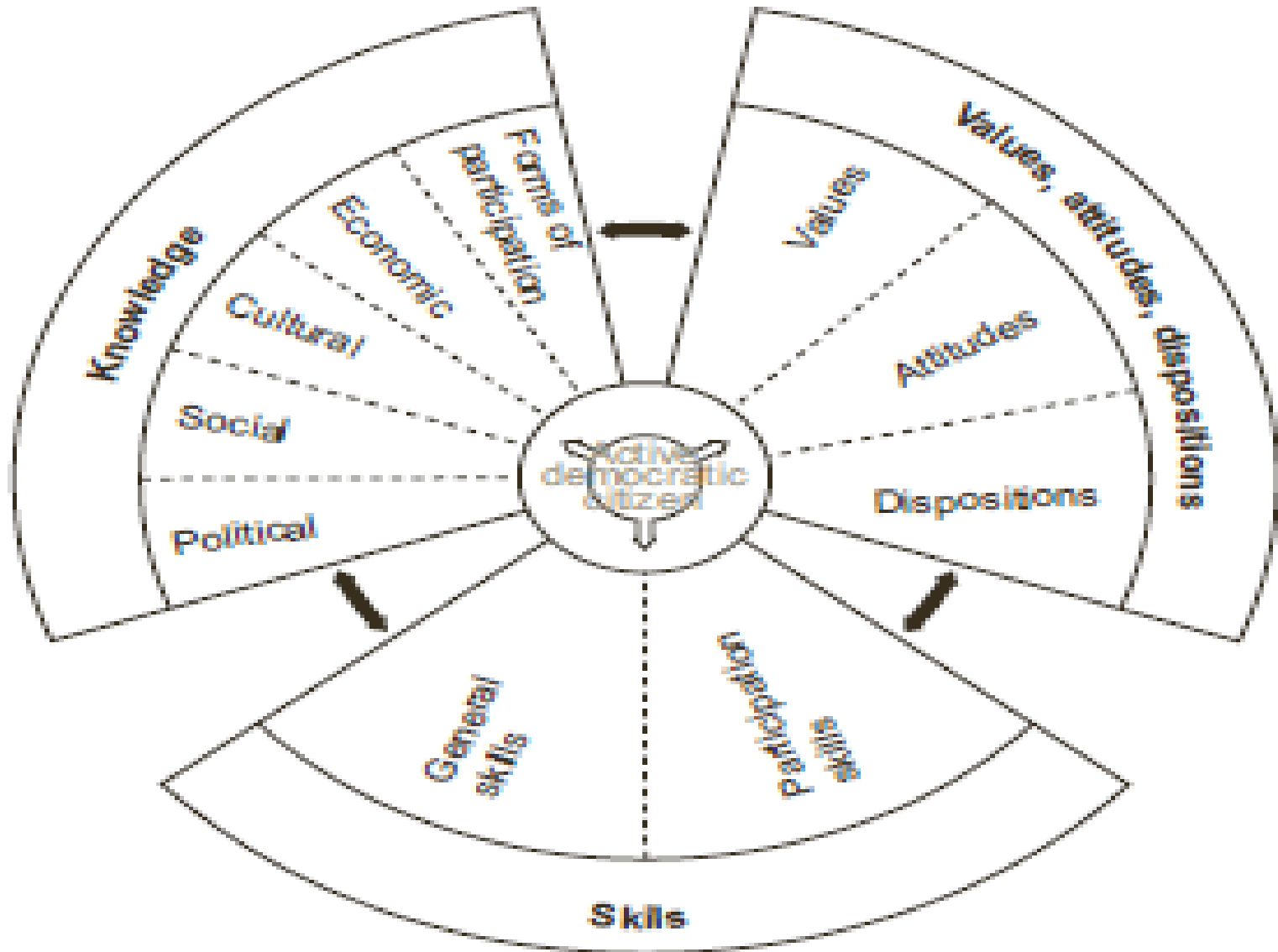
Problem Pembelajaran PKN, kecenderungan guru menganggap :

- PKN sekarang cenderung mengedepankan kajian politik;
- sulit mengembangkan materi pembelajarannya (selama era PMP/PPKN cukup menyampaikan materi nilai/moral);
- materinya sangat padat;
- Kajian Pancasila yang terbatas;

Pembelajaran PKN Kini dan ke Depan

- Berbasis kompetensi
- Metode ilmiah
- Tematik terpadu/tematik
- Aplikatif
- Pengalaman belajar langsung
- Penilaian otentik
- Pelibatan aktif siswa untuk mencapai seluruh komponen kompetensi hasil pembelajaran

Main categories of democratic citizenship education curriculum
(Ahmet Doğanay, 2012:31)



Scope of knowledge for active democratic citizenship education curriculum (Ahmet Doğanay, 2012:32)

<i>Political Knowledge</i>	<i>Social Knowledge</i>
Political and legal system Basic concept, principles and institutions of democracy Distribution of power and authority throughout history Concept of democratic citizenship Citizens rights and responsibilities including human rights Political decision making on local, national and international level Current political issues Main events, trends and change agents of national, European and world history Media literacy and the role of media in personal and social life National and international security	Social relations Social rights The function and work of voluntary groups and civil society Social differences (welfare, social security, health etc.)
<i>Cultural Knowledge</i>	<i>Economic Knowledge</i>
History and cultural heritage of own country Predominance of certain dominant roles and values Different cultures in the local, regional, national, and global context Preservation of the environment	Economic rights Economic principles and consequences of economic development Key financial matters and associated economic literacy Sustainable development locally and internationally
<i>Forms of Participation Knowledge</i>	
Knowledge of the forms of political, social, cultural, economic participation to the life.	

Sources: Audigier, 2000; Birzea, 2000; Johnson & Morris, 2010; Qualifications and Curriculum Authority (QCA), 1998; Veldhuis, 1997).

Scope of values, attitudes and dispositions for active democratic citizenship education curriculum (Ahmet Doğanay, 2012:33)

<i>Values</i>	<i>Attitudes</i>	<i>Dispositions</i>
<ul style="list-style-type: none"> • Acceptance of the rule of law • Respect for human dignity • Respect for human rights • Believing in democracy • Believing in peace • Believing in social justice, equality and equal treatment of citizens • Rejection of prejudice, racism and all kind of discrimination • Believing in solidarity • Respect for tolerance and toward differences • Respect for reasoning • Believing in preservation of environment • Believing in sustainable development • Valuing the freedom • Valuing the fairness 	<ul style="list-style-type: none"> • Commitment to truth • Open mindedness • Commitment to peace and constructive solutions to problems • Feeling confident to engage politically • Trusting in democratic principles, institutions and procedures as well as importance of civil action • Feeling responsible for own decisions and actions • Commitment to the value of mutual understanding, cooperation, trust and solidarity • Commitment to the principles of sustainable development • Sense of belonging 	<ul style="list-style-type: none"> • The intention to participate in the political community • The intention to be active in the community • The intention to participate in civil society

Sources: Audigier, 2000; Birzea, 2000; Crick, 1999; Johnson & Morris, 2010; Qualifications and Curriculum Authority (QCA), 1998; Veldhuis, 1997).

Scope of skills for active democratic citizenship education curriculum (Ahmet Doğanay, 2012:34)


<i>General skills</i>	<i>Participation Skills</i>
Critical thinking	<ul style="list-style-type: none">• Monitoring and influencing policies and decisions including participating in peaceful protesting• Resolving conflicts in a peaceful way• Participating voluntary -civil organizations as a member or contribution• Building cooperation and coalitions• Displaying democratic leadership• Living in a multicultural environment• Handling all kind of differences including gender, social, cultural, racial, and religious• Engagement in protecting environment• Ethical consumption and boycotting unethical products
Critical examination of information	
Distinguishing statements of facts from an opinion	
Reaching a balanced judgement, decision or point of view based on critical examination of information and reasoning	
Defending reached position	
<ul style="list-style-type: none">• Problem solving• Decision making• Creative thinking• Inquiry skills• Communication skills• Using media in an active way	

Sources: Audigier, 2000; Birzea, 2000; Johnson & Morris, 2010; Qualifications and Curriculum Authority (QCA), 1998; Veldhuis, 1997).

Perkembangan Tema PKn di Asia Pasifik

- ❑ Negara-negara Asia ditandai oleh modernitas ganda yang memberikan kekayaan dan konteks yang kompleks bagi perkembangan pendidikan kewarganegaraan.
- ❑ Pendidikan kewarganegaraan Asia lebih ditandai oleh konsepsi-konsepsi kebajikan moral dan nilai-nilai personal daripada nilai-nilai publik dan kewargaan.
- ❑ Masyarakat kewargaan (*civil society*) disusun secara berbeda di Barat dan di negara-negara Asia, namun tak pernah dapat memainkan peran penting.
- ❑ Negara-bangsa menjalankan peran yang sama antara di negara-negara Asia dan Barat berkaitan dengan pendidikan kewarganegaraan.
- ❑ Ada semacam ketegangan antara pendidikan kewarganegaraan, mata-mata pelajaran sekolah, dan kurikulum akademik.
- ❑ Para guru menjadi pemain penting ketika ia hadir untuk mengimplementasikan pendidikan kewarganegaraan di sekolah.
- ❑ Organisasi kesiswaan dalam menanggapi pendidikan kewarganegaraan perlu dilakukan dalam menentukan pertimbangan (Kennedy & Fairbrother dalam Samsuri, 2012: 50).

Ragam Pengorganisasian Kurikulum PKN

Sektor	PRINSIP PENGORGANISASIAN			
PRIMER	 WAJIB atau PILIHAN			
SEKUNDER	 <p>MATA PELAJARAN TUNGGAL/WAJIB (Civics/Civic Education/Citizenship Education)</p>	<p>TERINTEGRASI DENGAN MATA PELAJARAN LAIN (MISAL: SEJARAH, GEOGRAFI, SOCIAL STUDIES)</p>	<p>TERINTEGRASI LINTAS MATA PELAJARAN</p>	<p>KEGIATAN EKSTRA KURIKULER</p>

(Kennedy, 2009:8; Kerr, 1999:15)